

ABSTRAK

Pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah membutuhkan pemahaman menyeluruh dari pelaksanaan Manajemen keuangan daerah, dan adanya penyempurnaan secara kontinyu dari instansi yang berwenang agar tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dapat menjadi kenyataan. Kelancaran administrasi keuangan pada pemerintah daerah membutuhkan SDM yang berkualitas, dengan tujuan dapat melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan Analisis Deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah terutama di dalam pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas pada Bendahara SKPD sudah menerapkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Sistem Akuntansi Pemerintahan sudah menggunakan sistem terkomputerisasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Kata Kunci : Sistem, Prosedur, Pengelolaan Keuangan Daerah.